

SEKURITISASI PENANGANAN ISU PENGUNGS DI SWEDIA: BERHASIL ATAU GAGALKAH?

Tiffany Setyo Pratiwi

Staf Pengajar di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas
Teknologi Yogyakarta tiffany.pratiwi@staff.uty.ac.id

Abstract

This paper will explain about the securitization process in addressing refugees issue in Sweden from 2010 to 2015. This research uses the concept of securitization from Barry Buzan. Some important things which Buzan explained to analyze the process of securitization, such as: Referent Object (Actors), Existential Threats (things or issues that become threats), will proceed to be "Securitizing Move" by "Speech Act". This paper uses qualitative method which is arranged descriptively with support by secondary data. This paper found that the process of securitization on refugee policies in Sweden from 2010 to 2015 is supported by Sweden Democrats Party and gained the response of Swedish anti-immigrant society, they are conducting the "Speech Act" sustainably. The result is that Sweden's open policy on refugees has changed by restricting and tightening policy of refugee.

Keywords: *Democrats Sweden Party; Refugees Issue; Securitization Process; Swedish Government; Swedish Society Response*

Abstrak

Paper ini akan membahas tentang proses sekuritisasi dalam menangani isu pengungsi di Swedia dari tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi dari Barry Buzan. Beberapa hal penting yang dijelaskan Buzan untuk menganalisa proses sekuritisasi, yaitu: Referent Object (aktor), Existential Threats (hal atau isu yang menjadi ancaman), lalu akan berproses menjadi "Securitizing Move" dengan melakukan "Speech Act". Paper ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang disusun secara deskriptif dengan dukungan data sekunder. Paper ini menemukan bahwa proses sekuritisasi kebijakan penanganan isu pengungsi di Swedia di tahun 2010 hingga 2015 di dukung oleh Partai Demokrat Swedia dan mendapatkan respon masyarakat Swedia yang Anti-imigran. Partai Demokrat Swedia melakukan Speech Act secara kontinu. Dampaknya kebijakan terbuka Swedia selama ini terhadap pengungsi mengalami perubahan dengan melakukan kebijakan pembatasan dan pengetatan pengungsi yang masuk.

Kata Kunci: *Isu Pengungsi; Partai Demokrat Swedia; Pemerintah Swedia; Proses Sekuritisasi; Respon Masyarakat Swedia*

Pendahuluan

Tidak dapat disangkal bahwa kawasan Eropa adalah salah satu wilayah yang paling stabil secara ekonomi dan politik di dunia. Inilah yang banyak melatarbelakangi para imigran dari seluruh dunia mencari perlindungan suaka di Eropa, khususnya pengungsi. Salah satu negara yang menunjukkan dukungannya terhadap imigran yang masuk ke Eropa adalah Swedia. Negara ini memiliki sejarah panjang menyooal imigran. Swedia menjadi daratan imigran setelah Perang Dunia Kedua, dan didominasi oleh buruh-imigran

dari Finlandia dan Yugoslavia hingga tahun 1970. Bukan hanya imigran yang ingin mencari pekerjaan, tetapi para pengungsi mulai memasuki Swedia pada tahun 1990-an dari negara-negara Balkan, Asia dan Afrika (Brochmann, et.al 2012: 8-9).

Akan tetapi memasuki tahun 2015, sekitar lebih 137.000 migran menyeberangi Laut Tengah ke Eropa dalam enam bulan pertama (en.wikipedia.org). Kondisi tersebut menjadikan fenomena gelombang imigran terbesar terhitung sejak pasca Perang Dunia ke-2. Kondisi tersebut ternyata memberikan dampak bagi Swedia. Dampak yang ditimbulkan memberikan perubahan dalam dinamika kebijakan Swedia terhadap pengungsi.

Menjadi salah satu negara yang dikenal dengan kebijakan liberalnya terhadap pengungsi dengan menerapkan kebijakan integrasi dan memberikan subsidi terhadap pengungsi, ijin tinggal dan sebagainya. Kebijakan *Swedish Integration Policy* yang dibuat di tahun 2011 adalah bukti UU bahwa Swedia menerima pengungsi dengan tangan terbuka. Namun secara mengejutkan, Swedia lantas memberlakukan undang-undang baru yang isinya mengatur pengetatan jumlah pengungsi yang ingin masuk ke Swedia pada tahun 2015. Persoalan pengungsi yang awalnya dibungkus dengan isu kemanusiaan ternyata mengalami proses perubahan, yaitu adanya proses sekuritisasi isu pengungsi dalam kebijakan pengungsi yang dilaksanakan di Swedia. Proses ini dapat diidentifikasi dengan jelas dari peran *massif*-nya partai oposisi di Swedia, yaitu Partai Demokrat Swedia.

Partai Demokrat Swedia atau *Sweden Democrats Party* adalah partai politik nasionalis di Swedia yang didirikan pada tahun 1988, dikenal sebagai partai dengan membawa ideologi sayap kanan

atau nasionalis konservatif dan mengangkat agenda politik yang kontroversial, yaitu anti terhadap imigrasi. Jimmie Akesson adalah ketua partai sejak tahun 2005 (en.wikipedia.org).

Partai Demokrat Swedia merupakan satu-satunya partai yang membawa isu imigrasi sebagai agenda politik mereka. Partai Demokrat Swedia percaya bahwa kebijakan imigrasi Swedia selama ini terlalu “murah hati”. Hal itu disebabkan oleh banyaknya migran yang datang ke Swedia telah menyebabkan ketegangan sosial dan dampak ekonomi di dalam negeri. Kebijakan utama Partai Demokrat Swedia adalah didasarkan pada perlindungan “identitas nasional/*national identity*” sebagai cara mempertahankan kesejahteraan Swedia (sweden.se/society).

Penulis akan memfokuskan penelitian paper ini dengan menganalisis proses sekuritisasi kebijakan pengungsi di Swedia pada tahun 2010 hingga 2015. Hal ini penting untuk diketahui seperti apa proses sekuritisasi kebijakan penanganan pengungsi yang terjadi di Swedia yang ditengarai sebagai akibat dari arus deras nya pengungsi yang masuk hingga menimbulkan masalah yang kompleks di internal Swedia. Dengan memakai konsep Sekuritisasi dari Barry Buzan, Penulis mencoba menjawab pertanyaan: “Bagaimana sekuritisasi pengungsi di internal Swedia yang dilakukan oleh Partai Demokrat Swedia, berhasil atau gagalkah sekuritisasi tersebut?”

Kerangka Teori

Pendekatan terkait isu keamanan mengalami perubahan yang awalnya persepsi keamanan dilihat sangat tradisional dengan hanya fokus pada keamanan dengan negara sebagai *referent object*

dan melihat *referent object* selain negara tidaklah penting. Saat ini, pendekatan keamanan tidak hanya soal negara karena sebuah isu (Buzan et. al. 1998) akan dikatakan sebagai sebuah isu keamanan apabila isu tersebut terkait dengan hal yang mengancam (*existential threats*) suatu *referent object* yang cakupan aktornya bukan hanya negara saja, bahkan masyarakat masuk ke dalam kategori.

Isu yang disekuritisasi memiliki tahapannya (Buzan et. al. 1998), yaitu:



Masih menurut Buzan et. al. (1998), bahwa sebuah isu politis akan menjadi isu yang bisa disekuritisasi (*Securitizing Move*) adalah

dengan mengoptimalkan modal yang dimiliki *Securitizing Actor* (dalam hal ini bisa pemerintah, partai/kelompok oposisi, atau masyarakat). Jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan *Speech Act*. *Speech Act* bisa diartikan sebagai suatu pernyataan (bisa berupa pidato, publikasi, demonstrasi dan lain-lain) secara verbal dengan tujuan me-*labelling*-kan bahwa isu yang dimaksud adalah sebuah ancaman (*Existential Threats*) bagi negara dan masyarakatnya dengan memunculkannya ke ranah publik (audiens), dan audiens menerima suatu isu itu memang mengancam. Jadi secara sederhana, elemen-elemen penting dalam sekuritisasi, adalah: Pertama, aktor yang berperan melakukan sekuritisasi isu (bisa dilakukan oleh pemerintah, pemimpin politik, partai oposisi, komunitas atau kelompok organisasi). Kedua, *Referent Object* (sesuatu yang dilindungi dari ancaman yang ada, dalam konteks ini negara Swedia dan masyarakatnya). Ketiga, audiens yang berperan melegitimasi isu yang disekuritisasi.

Pembahasan

1. Identifikasi *Speech Act*

Aktor yang sangat lantang melakukan *securitizing move* dalam isu pengungsi di Swedia adalah partai oposisi, yaitu Partai Demokrat Swedia (*Sweden Democrats Party*). Partai Demokrat Swedia masuk ke parlemen pada tahun 2010, walaupun pada saat itu eksistensinya masih sangat lemah karena dukungan suara hanya berkisar 5,7% (Elgenius and Rydgren, 2017: 353). Baru memasuki tahun 2014, Partai Demokrat Swedia memiliki perwakilan di parlemen. Partai ini berkembang sangat pesat yang membawanya menjadi partai

terbesar ketiga di Swedia.

Awalnya Partai Demokrat Swedia melakukan speech act dengan membuat poster yang di pasang di subway kereta bawah tanah (theconversation.com).



Sumber: *telegraph.co.uk*

Saat ini, Partai Demokrat Swedia adalah partai ketiga terbesar dengan 49 perwakilan di parlemen (www.theguardian.com). Di laman website-nya, Partai Demokrat Swedia juga secara terang menjelaskan platform partai terkait masalah imigran dalam bahasa Swedia (sd.se/var-politik):

"Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet."

Artinya adalah bahwa Partai Demokrat Swedia tidak menentang adanya imigrasi. Namun, mengatakan bahwa imigrasi harus dijaga dengan baik pada tingkat tertentu (memantau masuknya imigran agar tidak membeludak) dengan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ancaman terhadap identitas nasional, kesejahteraan dan keamanan negara. Tidak hanya menjelaskan pandangannya terhadap masalah imigrasi, di dalam laman-nya, Partai Demokrat

Swedia memaparkan pandangannya terhadap masalah pencari suaka dan pengungsi:

“ Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FNs flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.”

Partai Demokrat Swedia memiliki pandangan untuk melindungi hak suaka, tetapi pada saat yang sama menekankan bahwa hak untuk mencari suaka tidak sama dengan hak untuk mendapatkan suaka. Pengungsi yang masuk harus di batasi dan memenuhi persyaratan Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Refugee Convention*). Pengungsi hanya diberikan izin tinggal sementara selama periode konflik.

Ketua Partai Demokrat Swedia, Jimmie Akesson, pada kesempatan wawancara dengan surat kabar Swedia *Dagens Nyheter* bahwa ia menginginkan larangan total terhadap imigrasi suaka ke Swedia.

“ My message to these people is that Sweden can not take you. The absolute majority, if not all, of those seeking asylum in Sweden don't have Sweden as their first safe country. They come from Germany and they come from Denmark. And they came to those countries from other countries.”

Pernyataan Akesson *my message to these people* tertuju bagi pencari suaka dan para pengungsi yang datang ke Swedia, atau dalam kondisi mereka di tolak di negara Jerman dan Denmark lalu mencari suaka ke Swedia, bahwa Swedia tidak bisa menerimanya.

Pernyataan Jimmie Akesson tersebut bisa diidentifikasi sebagai *speech act*.

Pada tahun 2014, Partai Demokrat Swedia memanfaatkan saluran radio sebagai upaya untuk memperluas pandangan mereka ke masyarakat Swedia tentang isu pengungsi. Pada tanggal 31 Mei 2014 di saluran *Swedish Radio News*, Jimmie Akesson menyatakan:

"We will not give them a residence permit in Sweden, and we'll definitely not give them a permanent residence permit. Just the fact that we decided to give them permanent residence permits in Sweden is an attracting factor, meaning that there will be even more. We have had such large immigration that it no longer holds. Therefore, it is time that we stop." (sverigesradio.se)

Sangat keras pernyataan Akesson bahwa pengungsi yang melarikan diri dari perang di Suriah seharusnya tidak menerima izin tinggal di Swedia. Berdasarkan statistik Badan Migrasi Swedia, sekitar 12.000 ribu orang Suriah mendapatkan izin tinggal di Swedia pada tahun 2013. *Speech* yang dilakukan Partai Demokrat Swedia tidak berhenti hanya memanfaatkan saluran radio. Memasuki tahun 2015, upaya yang jauh lebih luas dilakukan Partai Demokrat Swedia dengan mulai memanfaatkan *advertising campaign* atau kampanye melalui iklan sebagai upaya *speech act*. Penyebaran kampanye iklan dilakukan di dalam maupun di luar negeri (Jerman dan Denmark) dengan mengakses surat kabar dan media elektronik yaitu TV di kedua negara. Bahasa yang digunakan dalam slogan iklan tersebut juga sangat mudah untuk menarik perhatian audiens/masyarakat, yaitu: *"No money, no jobs, no homes"*. Kampanye ini dilakukan dengan sangat masif selama hampir 2 bulan sejak Oktober hingga November. Upaya mensekuritisasi isu pengungsi yang dilakukan Partai Demokrat Swedia mendapatkan respon, karena mulai

muncul mereka yang menyebut dirinya sebagai aktivis *Sweden Democrats*, mereka menyebarkan selebaran yang ditujukan kepada para imigran, dengan tulisan: “*Sweden has nothing to offer except “tents and camp beds,” and all migrants will “eventually be sent back home.”*” (www.rt.com/news). Selebaran itu bertuliskan bahwa Swedia tidak memiliki apa pun kecuali tenda dan tempat tidur, dan semua migran akhirnya akan dikirim kembali ke negara mereka.

Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri sekuritisasi isu pengungsi di internal Swedia juga di pengaruhi dengan kondisi regional Eropa, yang mana pada tahun yang sama terjadi serangan di Paris yang ternyata memberikan pengaruh terhadap kenaikan pamor Partai Demokrat Swedia sebesar 17,6 persen. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini (www.economist.com) memaparkan bahwa dukungan bagi Partai Demokrat Swedia naik menjadi 24%, jumlah ini dua kali lipat dari suara pada tahun 2014.

Bagi Partai Demokrat Swedia, isu pengungsi menjadi isu politik yang mampu memberikan peluang bagi partai untuk menyebarluaskan di ranah publik tentang pandangan politik mereka terhadap isu pengungsi. Proses sekuritisasi sendiri secara tidak langsung didukung dengan adanya permasalahan yang terjadi di Swedia, yaitu masalah pengangguran dan keamanan. Artinya dua permasalahan tersebut sebenarnya menguntungkan pihak Partai Demokrat Swedia sebagai modal mereka dalam mem-framing isu pengungsi sebagai *existential threats*.

2. Pemicu Sekuritisasi: Masalah Pengangguran, Keamanan, atukah Politik?

Masalah pengangguran dan keamanan merupakan aspek penting yang harus dijaga oleh negara di dunia, tak terkecuali

Swedia. Fakta ketika gelombang pencari suaka pada tahun 2015 secara langsung memberikan tantangan. Masalah utamanya adalah soal pekerjaan. Menurut *The Economist*, sekitar 5% orang Swedia menganggur, dan imigran sendiri berjumlah tiga kali lipatnya. Institut Kebijakan Migrasi menjelaskan bahwa masalah mencari pekerjaan di Swedia telah meningkat dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah kurangnya pekerjaan dengan keterampilan rendah yang tersedia untuk imigran yang memiliki keterampilan rendah. Hal itu menyebabkan tingginya jumlah imigran pengangguran di Swedia (www.migrationpolicy.org). Menyangkut soal keamanan di Swedia beberapa tahun terakhir, ketegangan sosial di Swedia meningkat akibat serangan teroris yang muncul. Kepala Penelitian Aksi Terorisme di Universitas Pertahanan Swedia, Magnus Ranstorp, menemukan bahwa sekitar 12.000 pencari suaka yang ditolak untuk tinggal di Swedia, dan mereka tidak kembali ke negara asal mereka, dan sekitar 3.000 diantaranya berlokasi di wilayah Stockholm, di mana serangan teroris terjadi (www.usnews.com).

Swedia termasuk negara yang mana pasar tenaga kerjanya tidak bermasalah di dunia. Ekonomi tumbuh dan lowongan kerja melimpah. Tetapi, pekerja luar ternyata tiga kali lebih mungkin menganggur dan rasionya meningkat beberapa tahun belakangan. Bagi mereka yang berasal dari luar Uni Eropa, rasionya jauh lebih tinggi sekitar 22,5% yang menganggur. Belum lagi isu diskriminasi hingga masalah tempat tinggal yang di alami oleh para pengungsi. Ditambah ketersediaan pasar kerja Swedia tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki banyak pengungsi yang mayoritas pekerja dengan *low-skill* (www.economist.com). Mungkinkah meningkatnya pengangguran di Swedia karena kegagalan mengintegrasikan para

imigran ke dalam pasar tenaga kerja, dan bisa sangat mungkin berpotensi menimbulkan marginalisasi sosial dan frustrasi di kalangan imigran yang menganggur sehingga mereka bisa dengan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal hingga pengaruh terburuk adalah masuk jaringan kelompok-kelompok teroris. Kegelisahan inilah yang di bawa Partai Demokrat Swedia untuk menjadikan isu pengungsi sebagai isu keamanan.

Akan tetapi, menanya lebih jauh soal apa yang menjadi pemicu di balik sekuritisasi isu pengungsi di Swedia, jawaban selain faktor ekonomi dan keamanan adalah sebagai agenda politik partai dalam mendapatkan dukungan. Membawa isu yang tidak umum digunakan partai lain sebagai *platform*, bagi seorang Jimmie Akesson bisa saja menjadi cara ampuh dalam menjaring suara bagi mereka yang khawatir tentang masalah yang ditimbulkan dari masuknya imigran. Seperti yang disampaikan perwakilan Partai Swedia Demokrat di parlemen, Mattias Karlsson: “ *The Sweden Democrats will act to try to stop any government that chooses to pursue a growth in immigration...*” (www.theguardian.com). Tak salah rasanya untuk mengatakan bahwa Partai Demokrat Swedia menangkap isu sekuritisasi pengungsi sebagai peluang yang sangat baik dalam meraup dukungan politik.

Sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi, narasi-narasi yang coba di bangun oleh Partai Demokrat Swedia sejauh ini menekankan pada dua aspek yaitu masalah ekonomi yang berkaitan dengan tingkat pengangguran, dan masalah keamanan domestik yang berkaitan dengan tingkat kriminalitas dan potensi ancaman serangan terorisme. *Speech act* yang dilakukan meliputi pendekatan politik yaitu dengan kampanye politik dan pendekatan media

massa, dengan menggunakan atribut seperti poster, wawancara via siaran radio, dan memuat berita di koran lokal hingga internasional, serta mengoptimalkan media sosial.

3. Respon Masyarakat Swedia Terhadap Imigran/Pengungsi Sebagai Ancaman: Menerima atau Menolak?

Untuk menjelaskan bagaimana respon masyarakat Swedia terhadap isu pengungsi sebagai ancaman atau tidak, maka Penulis mencoba memaparkan dari adanya aksi demonstrasi dan menampilkan berbagai survei dan opini publik yang dilakukan media massa termasuk media online dalam membingkai isu pengungsi di Swedia sehingga diharapkan bisa memberikan gambaran kecenderungan respon masyarakat Swedia menerima atau menolak isu imigran/pengungsi disebut sebagai ancaman bagi keamanan negara.

Pada saat Partai Demokrat Swedia melakukan iklan kampanye di *subway* kereta bawah tanah pada tahun 2015, respon masyarakat beragam dari yang mendukung dan yang menolak kampanye tersebut. Penolakan datang dari masyarakat Swedia, sekitar 1000 orang berdemonstrasi di alun-alun Norrmalmstorg di Stockholm, untuk memprotes kampanye iklan oleh Partai Demokrat Swedia yang anti-imigrasi (sverigesradio.se/sida/artikel).

Berhasil memasuki parlemen pada tahun 2010, masalah imigran telah menjadi salah satu agenda politik partai ini. Sebelum berhasil memasuki parlemen di tahun 2010, di tahun 2008 masyarakat Swedia awalnya cenderung tidak menaruh simpati terhadap partai ini, dengan data menunjukkan bahwa dukungan masyarakat Swedia hanya berkisar 1,8% dari suara nasional (www.theguardian.com).

Akan tetapi, dukungan masyarakat Swedia perlahan namun pasti semakin besar, alhasil partai ini dinobatkan sebagai partai terbesar ke-tiga di Swedia hari ini. Dengan memperoleh 49 kursi dari total 349 kursi di parlemen Swedia.

Surat kabar online Independent Inggris di tahun 2016 lalu melakukan survei di beberapa negara Eropa terkait respon masyarakat di tiap negara terhadap kedatangan pengungsi dengan menitikberatkan pada pertumbuhan aksi terorisme, pekerjaan, dan peningkatan aksi kriminalitas. Dari survei yang dilakukan pada bulan April hingga Mei 2016 tersebut, Swedia mendapatkan persentase cukup tinggi dalam merespon kehadiran pengungsi dengan peningkatan aksi terorisme dan kriminalitas yang masing-masing sekitar 57% dan 46%, sedangkan untuk masalah pekerjaan sekitar 32% (www.independent.co.uk).

Sesuatu yang menarik dan kiranya fakta ini tidak bisa di kesampingkan adalah antusiasme masyarakat Swedia bisa terlihat dari jumlah likes di laman Facebook yang dimiliki Ketua Partai Demokrat Swedia, Jimmie Akesson, yang mencapai angka 25.000 ribu. Kalah jauh dibandingkan dengan Perdana Menteri Swedia dengan jumlah *likes* hanya sekitar 3.000 ribu (www.opensocietyfoundations.org). Fakta ini mengisyaratkan bahwa cara yang ditempuh Partai Demokrat Swedia dengan banyak menggunakan media sosial sebagai alat *Speech Act* di rasa cukup efektif mendapatkan perhatian masyarakat Swedia.

Namun pertanyaan yang kemudian muncul, apakah dukungan di media sosial yang begitu besar, hasil survei yang menunjukkan adanya keberpihakan masyarakat Swedia sudah cukup kuat membawa isu pengungsi sebagai isu yang berhasil di sekuritisasi? Berikut Penulis akan bahas di sub bab berikutnya.

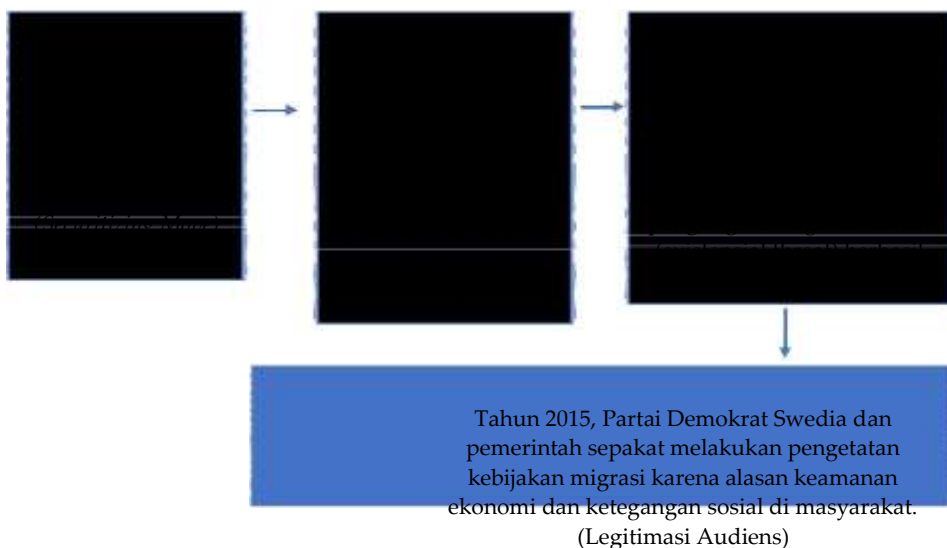
4. Gagal atau Berhasilkah Masalah Pengungsi di Sekuritisasi?

Buzan (1988) menjelaskan sekuritisasi bisa terjadi jika ada ancaman (*existential threats*) yang memang terjadi, maka dalam *case* Swedia yang dimaksud adalah ancaman keamanan karena pengungsi yang masuk terhadap negara dan masyarakat, lalu terjadi *securitizing move* yang awalnya isu pengungsi merupakan isu yang tidak menjadi perhatian khusus masyarakat Swedia, karena kebijakan yang toleran dan liberal, lalu hal tersebut mengalami perubahan. *Securitizing actor* yang melakukan sekuritisasi yaitu Partai Demokrat Swedia melalui *speech act* yaitu melalui media massa hingga online, interview, dan kampanye politik. Ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan Partai Demokrat Swedia memiliki dampak sosial yang cukup kuat terhadap paradigma atau pandangan masyarakat Swedia terhadap pengungsi. Kita dapat melihat bahwa sekuritisasi yang dilakukan Partai Demokrat mampu mempengaruhi kebijakan imigrasi di Swedia misalnya, kontrol perbatasan.

Pemberlakuan kontrol perbatasan terhadap para imigran menyusul dengan banjirnya imigran yang masuk di akhir tahun 2015 hampir berjumlah 190.000 imigran dan mengakibatkan pembekakan keuangan internal Swedia untuk menjamin kehidupan para imigran. Sehingga di akhir tahun 2015, Pemerintah Swedia dan partai oposisi di Swedia mencapai kesepakatan untuk memperketat peraturan tentang imigrasi (www.reuters.com). Alhasil menurut data dari Badan Migrasi Swedia, jumlah migran yang memasuki Swedia mengalami penurunan 30 persen setelah pemerintah memulihkan kontrol perbatasan pada 12 November 2015 (www.thejournal.ie). Pada tahap ini dapat diidentifikasi

bahwa pemerintah yang berkuasa pada akhirnya menerima bahwa imigran atau pengungsi yang masuk bisa menjadi ancaman. Walaupun pada tahun sebelumnya, pada tahun 2014, pemerintah masih menyangkal ancaman yang ditimbulkan dengan masuknya pengungsi. Perdana Menteri Swedia, Reinfeldt, masih cukup yakin walaupun ada penambahan beban anggaran tidak akan mengganggu stabilitas keamanan ekonomi Swedia. Reinfeldt bahkan menghimbau masyarakat Swedia untuk tetap membuka hati mereka kepada orang-orang yang sedang menderita di luar sana untuk tinggal di Swedia, “*asking the Swedish people to open their hearts for those vulnerable people who we see around the world*” (Magnusdottir, 2016:102). Namun, selang setahun sikap pemerintah mulai menunjukkan perubahan. Perdana Menteri yang baru yaitu Stefan Lovhen saat di wawancarai dengan media massa Swedia, beliau menjelaskan bahwa Swedia butuh ruang, Swedia tidak bisa menerima suaka dengan jumlah yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut pernyataan beliau: “*It pains me to say that Sweden can no longer take in asylum seekers at the same high level, Sweden needs some breathing room*” (www.thejournal.ie). Kondisi ini menjelaskan bahwa isu pengungsi sebagai sebuah ancaman terhadap negara dan masyarakat Swedia berhasil disekuritisasi, yang tentunya didukung kuat dengan upaya-upaya yang dilakukan Partai Swedia Demokrat dalam mengangkat isu ini.

Adapun skema upaya sekuritisasi yang dilakukan Partai Demokrat Swedia adalah sebagai berikut:



Efek nyata dari pemberlakuan kontrol perbatasan di Swedia sangatlah signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah pencari suaka dari angka 39.000 pada bulan Oktober 2015 menjadi 14.000 pada bulan Desember 2015, lalu turun signifikan lebih jauh ke angka 4.000 pada bulan Januari 2016. Sepanjang tahun 2016, pengajuan pencari suaka bagi pengungsi berada di angka sekitar 2.000 per bulan (Suzan Fratzke, 2017: 8).

Kesimpulan

Aktor yang melakukan securitizing move dalam isu pengungsi di Swedia adalah partai oposisi, yaitu Partai Demokrat Swedia (*Sweden Democrats Party*). Partai Demokrat Swedia masuk ke parlemen pada tahun 2010. Saat ini, Partai Demokrat Swedia adalah partai ketiga terbesar dengan 49 perwakilan di parlemen. Perbedaan *platform* Partai Demokrat Swedia dengan partai lain di Swedia adalah pandangan bahwa arus masuk imigran harus di jaga ketat agar tidak menimbulkan ancaman terhadap identitas dan

keamanan nasional, partai ini juga dikenal sebagai partai yang anti imigran. Sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi, ada dua aspek penting yang menjadi kunci bagi Partai Demokrat Swedia untuk melakukan *securitizing move* ke ranah publik yaitu masalah ekonomi yang berkaitan dengan tingkat pengangguran dan pembengkakan anggaran negara, dan masalah keamanan domestik yang berkaitan dengan tingkat kriminalitas dan potensi ancaman serangan terorisme. Partai Demokrat Swedia melakukan securitizing move melalui speech act yaitu dengan memanfaatkan media massa hingga online, media sosial seperti facebook, interview lewat siaran radio dan wawancara di televisi, dan kampanye politik, lobi-lobi politik hingga memasang atribut poster. Dengan berbagai upaya speech act yang dilakukan dari tahun 2010, hasilnya menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan Partai Demokrat Swedia memiliki dampak sosial dan politik yang cukup kuat terhadap paradigma atau pandangan masyarakat Swedia terhadap pengungsi. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan politik pada saat pemilu yang melesat tajam hingga membawa partai ini menjadi partai ke-tiga terbesar di Swedia. Lobi politik dapat diidentifikasi berhasil karena lobi politik antara partai oposisi (Partai Demokrat Swedia) dan pemerintah untuk melakukan kebijakan baru dengan pengetatan imigran yang masuk ke Swedia berhasil di berlakukan pada tahun 2015.

Daftar Pustaka

Buku:

- Buzan, B., Weaver, O. and de Wilde, J. (1998) *Security – A New Framework for Analysis*, Colorado: Lynne Rinner Publishers, Inc., Boulder.
- Brochmann, Grete. Haggelun, Anniken. 2012. *Immigration Policy and Skandinavian Welfare State 1945-2010*. Penerbit: Palgrave Macmillan.
- Fratzke, Suzan. 2017. *Weathering Crisis, Forging Ahead: Swedish Asylum and Integration Policy*. Washington DC: Published by Migration Policy Institute.

Jurnal:

- Elgenius, Gabriella. Jens Rydgren. 2017. *The Sweden Democrats and The Etno-Nationalist Rhetoric of Decay and Betrayal*. Sociologisk Forskning, 2017, Vol 54, 4. 353-358 daring <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1168350/FULLTEXT01.pdf> di akses pada tanggal 7 Juni 2018
- Magnusdottir L, Gunnhildur. 2016. *Immigrant Representation in the Swedish Parliament: Towards Homogeneity or United Diversity?*. Social Change Review, Winter 2016, Vol. 14(2): 97-120, daring <https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/23521/G.Magnusdottir%202016-Immigrant%20Representation%20in%20the%20Swedish%20Parliament.pdf?sequence=2> diakses pada tanggal 6 Juni 2018

Sumber Internet:

- Birdwell, Jonathan. 2012. Social Media and The Rise of The Far Right in Sweden. *Opensocietyfoundations.org*. Accessed June 3, 2018. <https://www.opensocietyfoundations.org/voices/social-media-and-the-rise-of-the-far-right-in-sweden>
- Brown, Andrew. 2010. Swedish Elections: The Impacts of Immigration. *Theguardian.com*. Accessed June 1, 2018 <https://www.theguardian.com/world/2010/sep/18/swedish-elections-far-right>
- European Migrant Crisis. Wikipedia. Accessed May 30, 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis
- Orange, Richard. 2015. Anti Immigrants Sweden Democrats Now The Biggest Party, According to Poll. *Telegraph.co.uk*. Accessed May 27, 2018. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11814498/Anti-immigrant-Sweden-Democrats-now-the-biggest-party-according-to-poll.html>
- Website Resmi Partai Demokrat Swedia. Accessed May 28, 2018. <https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/>
- Website Resmi Pemerintah Swedia. Accessed May 25, 2018. <https://sweden.se/society/political-parties-in-sweden/>
- Widfeldt, Anders. 2016. Why is Sweden Tightening its Borders After Years Welcoming Migrants?. *TheConversation.com*. Accessed May 30, 2018. <http://theconversation.com/why-is-sweden-tightening-its-borders-after-years-of-welcoming-migrants-53000>
- Yeung, Peter. 2016. Refugees Crisis: Majority of Europeans Believe Increased Migration Raises Terror Threat, Survey Sasy. *Independent.co.uk*. Accessed June 2,

2018. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-asylum-seekers-europe-terrorism-terror-threat-brexit-immigration-migrants-a7132256.html>
<https://www.theguardian.com/world/2014/dec/03/sweden-coalition-far-right-threatens-block-budget-immigration>
- _____. 2015. Stay Away Refugees, Sweden is Full. *TheLocal.se*. Accessed May 27, 2018 <https://www.thelocal.se/20151017/kesson-stay-away-refugees-sweden-is-full/>
- _____. 2014. Akkesson: Stop Refugees From Syria. *sverigesradio.se*. Accessed May 27, 2018. <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5877384>
- _____. 2015. 1000 Demonstrate Againsts SD Posters. *sverigesradio.se*. Accessed May 30, 2018. <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6225673>
- _____. 2016. Refugees in Sweden Seeking Asylum and Jobs. *Economist.com* Accessed June 1, 2018. <https://www.economist.com/finance-and-economics/2016/11/05/seeking-asylum-and-jobs>
- _____. 2015. Sweden Tightening Immigration Law Amid Record Asylum Numbers. *Reuters.com*. Accessed June 4, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-sweden-agreement/sweden-to-tighten-immigration-laws-amid-record-asylum-numbers-idUSKCN0SH0S120151023>
- _____. 2015. We Need Some Breathing Room: Sweden is Tightening Its Asylum Rules. *thejournal.ie*. Accessed June 4, 2018. <http://www.thejournal.ie/sweden-tightening-asylum-rules-2465064-Nov2015/>

